

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR WAHYU NIRMALA  
Tahun 2018**



**PT. BPR WAHYU NIRMALA  
JL. RAYA BUDUK NO. 7  
MENGWI - BADUNG**

# DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
1.1.1	Tujuan Penerapan Tata Kelola	1
BAB II	Pelaksanaan Tata Kelola	3
2.1	Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance	4
2.1.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	4
2.1.2	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	6
	a. Fungsi kepatuhan	6
	b. Fungsi audit intern	8
	c. Fungsi audit ekstern	9
2.1.3	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	9
	a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi	9
	b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit	10
	c. Sistem pengendalian intern	10
2.1.4	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) atau BMPK	10
2.1.5	Rencana Strategis Bank	11
2.1.6	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	12
2.2	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	12
2.3	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	13
2.4	Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	13
2.5	Share Option	14
2.6	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	14
2.7	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	14
2.8	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	15
2.9	Permasalahan Hukum	15
2.10	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	15
2.11	Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	15
BAB III	Kesimpulan	16
3.1	Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Corporate Governance	16
3.2	Penutup	16

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

PT. BPR Wahyu Nirmala menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bukan lagi merupakan suatu keharusan, tetapi sudah menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Melalui tata kelola yang baik, BPR dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja perbankan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah untuk kepentingan shareholders, stakeholders, dan para pengguna jasa keuangan.

Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam struktur organisasi, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perbankan tetapi menjadi bagian dari budaya BPR untuk mencapai 5 (lima) pilar dasar dari GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) atau TARIF. Penerapan 5 (lima) pilar dasar tersebut diyakini oleh BPR sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan BPR, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha secara menyeluruh.

### 1.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten melalui 5 (lima) pilar tata kelola akan memberikan manfaat bagi BPR untuk :

- a. Menciptakan landasan bagi BPR untuk mengelola usaha dengan nilai-nilai yang baik, dengan cara yang benar, di waktu yang tepat dan oleh orang yang tepat.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

PT. BPR Wahyu Nirmala memahami bahwa kelangsungan hidup BPR tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, namun juga melalui performa

internal BPR yaitu etika dan budaya kerja pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik. Kedepannya sejalan dengan salah satu nilai inti perusahaan (*core values*) yaitu BISA , bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi BPR yang baik dalam hal pelayanan dan inovasi. Langkah yang dilakukan adalah dengan selalu mengutamakan nasabah dalam setiap kegiatan bisnis dengan memberikan solusi yang inovatif melalui produk, proses dan layanan.

## **BAB II**

### **Pelaksanaan Tata Kelola**

Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Wahyu Nirmala Tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016.

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Wahyu Nirmala antara lain :

- A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada pasal 76 POJK Tata Kelola BPR dan
- B. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* mencakup:

1. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - c. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
  - d. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
  - e. Rencana strategis.
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
  - g. Informasi lain yang terkait dengan GCG.
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal di setor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
  - a. Bank lain.
  - b. Lembaga keuangan bukan Bank dan
  - c. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

5. *Shares option*.
6. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
9. Permasalahan hukum
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan *buyback shares* dan/atau *buyback obligasi*.
11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

2.1 Transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan:

- a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Komisaris Utama dengan komposisi sebagai berikut:
  - Komisaris Utama : Luh Putu Hartami, SE., MM., MBA.
  - Anggota Komisaris : Ni Luh Putu Ratnasari, SE.
- b. Direksi berjumlah 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dengan komposisi sebagai berikut:
  - Direktur Utama : I Ketut Karwa, SE.
  - Direktur : I Gede Sudiarta, SE.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi:

- a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
  - Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali yang mencakup Rencana Bisnis, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis dan Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR.

- Dewan Komisaris aktif merespon atas kondisi yang berpotensi membahayakan usaha BPR, sebagaimana terjadi sepanjang tahun 2018 diantaranya tingginya rasio NPL dan melambatnya pertumbuhan *Lending*, melalui nasehat dan pengawasan kepada Direksi.
  - Dewan Komisaris aktif memberikan pengarahan, masukan dan terobosan-terobosan terkait dengan kompetensi dan pengembangan karyawan, kepatuhan terhadap peraturan (APU-PPT, PPATK, LPS dan Tata Kelola yang baik).
  - Dewan Komisaris telah membangun komunikasi dengan Audit Internal, dan Direktur Kepatuhan untuk memitigasi risiko dan demi terselenggaranya tata kelola yang baik.
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya.
  - Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.
  - Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris,, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit.
- b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi:
- Direksi telah menetapkan ketentuan tentang kepegawaian, gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Direksi telah menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini Nomor 37/POJK.03/2016 yang memuat langkah-langkah strategis, target jangka pendek dan menengah, penyaluran dan penghimpunan dana, pengembangan organisasi dan teknologi informasi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  - Direksi telah mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian (jenjang karir, kepangkatan, golongan dan sistem promosi), bisnis dan kepatuhan melalui Surat Keputusan, edaran, memo internal dan rapat yang didokumentasikan yang dapat diakses seluruh karyawan.

- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- Direksi telah menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab sepanjang tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan kenaikan gaji karyawan tahun 2018
- b. Rekomendasi penunjukan jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh KAP.
- c. Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh KAP.
- d. Persetujuan Rencana Bisnis tahun 2019.
- e. Persetujuan atas Standar Pedoman Oprasional:
  - SPO Penempatan Dana Antar Kantor : 16/SK/V/2018
- f. Pengangkatan PE Kepala Bagian Kredit atas nama Ni Made Sudiasih Surat Keputusan Direksi No. 08/SK/DIR/SDM/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
- g. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama RR. Pundya Asmita, SE Surat Keputusan Direksi No. 09/SK/DIR/SDM/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
- h. Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Singaraja atas nama I Nyoman Kusumarjaya, SS Surat Keputusan Direksi No. 18/SK/DIR/SDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
- i. Penjualan AYDA sebanyak 3 (tiga) debitur sebesar Rp 647.388.662,-

#### 2.1.2 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

##### a. Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2018, PT. BPR Wahyu Nirmala telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain:

- Melaksanakan sosialisasi peraturan.
- Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.



- Menyediakan informasi peraturan OJK dan regulator lainnya, surat-surat Keputusan Direksi, SOP Internal, *Job Desc* dan informasi lainnya dalam sharing file BPR yang dapat diakses oleh karyawan.
- Melakukan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan penilaian risiko setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas bank, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan pendapat dan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- Menindaklanjuti komitmen BPR kepada OJK dan regulator lainnya.
- Melakukan koordinasi dalam rangka penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank berbasis risiko.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan pengembangan materi *e-learning* penerapan APU dan PPT.

#### Indikator Kepatuhan

Indikator kepatuhan 2018 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- BPR telah memenuhi seluruh komitmen kepada Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas pemeriksaan umum dalam surat No SR-03/KR.08122/2018 yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2018.
- Tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran terhadap batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait, maupun kepada pihak tidak terkait.
- Pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015.
- Tidak terdapat keterlambatan pelaporan rutin bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada pihak eskternal.

Selanjutnya Manajemen BPR mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR memenuhi semua peraturan yang berlaku melalui beberapa kegiatan seperti:

- Memberi informasi kepada semua bagian/seksi termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan baru OJK. Selain itu juga melakukan pelatihan internal, *study meeting* dan menugaskan karyawan terkait untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan di OJK setempat.
- Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK dalam rapat kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Bagian.
- Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
- Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan *Self Review* Kepatuhan secara berkala.
- Membuat rencana kerja kepatuhan serta senantiasa melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi dari rencana kerja tersebut.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan dengan tepat.
- Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

b. Fungsi audit intern

Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan (rekap hasil audit harian dan mingguan) dan audit khusus telah sesuai dengan rencana tahun 2018 yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris dengan pokok-pokok temuan pemeriksaan antara lain :

- Kelemahan analisa dalam bidang perkreditan, potensi risiko terhadap kegagalan penyedia jasa *core banking system*, rekonsiliasi pembayaran PPh

pasal 4 ayat 2, penguasaan dan pemahaman petugas *front liner* terkait APU PPT dan manajemen likuiditas.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada audit intern berbasis risiko seperti SOP internal, ketentuan dan peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit internal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi audit ekstern

- BPR hanya menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit (dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris) dan melaksanakan penunjukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan terbaru dalam POJK No. 13/POJK.03/2017.
- BPR telah membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- Dalam proses penunjukan KAP, BPR tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas profesionalisme kinerja KAP.

### 2.1.3 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dibantu Auditor Internal.
- Dewan Komisaris telah melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan prosedur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Auditor Internal.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penerapan limit
- Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat, tugas wewenang, tanggung jawab dan larangan.
  - Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan otorisasi transaksi dari setiap unit bagian.
  - Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan penandatanganan dokumen-dokumen dan surat berharga.
  - PT. BPR Wahyu Nirmala telah menetapkan pemisahan fungsi, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis pada setiap unit bagian.
- c. Sistem pengendalian intern
- BPR telah menyampaikan laporan pengendalian internal kepada Dewan Komisaris setiap bulan.

2.1.4 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) atau BMPK

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana (dalam Jutaan Rp)	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
	Kepada pihak terkait		
1	Individu	6	1.430
2	Kelompok	Nihil	Nihil

- b. Penyediaan dana besar (*Large exposure*) kepada pihak tidak terkait posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana (dalam Jutaan Rp)	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
	Kepada pihak tidak terkait		
1	>1.000 s.d 4.000	Nihil	Nihil
2	>500 s.d 1.000	6	4.207

### 2.1.5 Rencana Strategis Bank

Dari strategi rencana bisnis tahun 2018 baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengembangan karyawan, BPR telah memperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Tabungan yang dihimpun sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp 6.504.053 ribu atau tercapai sebesar 90,67% dari target sebesar Rp 7.173.364 ribu dengan selisih negatif sebesar Rp 669.311 ribu. Sedangkan total tabungan sampai akhir tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 396.513 ribu atau naik 6,49% dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.107.540 ribu.
- b. Deposito sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp 15.240.700 ribu atau tercapai sebesar 115,42% dari target sebesar Rp 13.204.026 ribu dengan selisih positif sebesar Rp 2.036.674 ribu. Total deposito sampai akhir tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.046.700 ribu atau naik 7,37% dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp 14.194.000 ribu.
- c. Penyaluran dana dalam bentuk kredit sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp 23.020.356 ribu atau tercapai sebesar 82,67% dari target sebesar Rp 27.845.720 ribu dengan selisih negatif sebesar Rp 4.825.364 ribu. Total penyaluran dana dalam bentuk kredit sampai akhir tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 678.753 ribu atau turun 2,86% dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp 23.699.109 ribu.
- d. Realisasi pengembangan karyawan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Melakukan perekrutan 1(satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang IT, 1 (satu) orang SPI, 1 (satu) orang Kepala Cabang, 1 (satu) orang Marketing Dana dan 3 (tiga) orang AO.
  - Selama tahun 2018, karyawan BPR telah mengikuti pelatihan dan pendidikan baik yang diadakan oleh internal maupun eksternal, sebagai berikut :

No	Topik Sosialisasi/Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	How To Have A Beautiful Mind	Seluruh Karyawan	20 Januari 2018
2	Pelatihan SPI atau Audit Intern	SPI	23-24 Januari 2018
3	Sosialisasi Solusi untuk Digital Micro Banking	Direktur Utama	01 Maret 2018
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bagi BPR	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	12-13 Maret 2018
5	Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan sehubungan dengan Implementasi UU No.9 tahun 2017	PE. Kepatuhan	23 April 2018
6	Sosialisasi Simpanan Pelajar (SimPel)	Kabag Operasional	27 April 2018

No	Topik Sosialisasi/Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
7	Sosialisasi Pefindo Bori Kredit	Direktur Utama	09 Mei 2018
8	Manajemen Tunggakan dan Penyelesaian NPL	Direktur Utama & Bagian Kredit	16 Mei 2018
9	Penunjukan dan Evaluasi KAP	Komisaris & PE. Kepatuhan	26 Juni 2018
10	Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2018 di Bali	Direktur Utama	02 Agustus 2018
11	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Pemasar Kredit BPR se- Provinsi Bali	Bagian kredit	15-16 Agst 2018
12	Pelatihan Hipno Selling	Direktur	20 Agustus 2018
13	Workshop Pelaksanaan Tugas & tanggung Jawab Dewan komisaris BPR	Komisaris Utama	28 Agustus 2018
14	Pelatihan APU & PPT	Front Liner	21 September 2018
15	Pelatihan Achievement Motivation Training	Seluruh Karyawan	23 September 2018
16	Klinik Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk BPR se-Provinsi Bali	Direktur Utama	27 September 2018
17	Training tentang Meningkatkan Kinerja dengan Membangun Sikap Positif	Seluruh Karyawan	14 Oktober 2018
18	Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Lapbul BPR dan Evaluasi Pelaporan SLIK	PE. Kepatuhan	15-16 Okt 2018
19	Pelatihan Penyusunan RBB	Komisaris, PE. Kepatuhan	16 November 2018
20	Pelatihan FGD (Focus Group Discoussion)	Direktur	21 Desember 2018

#### 2.1.6 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

- a. BPR telah menyampaikan laporan tahunan yang mencakup profil BPR, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen.
- b. BPR telah menyampaikan laporan keuangan publikasi secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, diumumkan pada papan pengumuman BPR dan diunggah pada laman website yang dapat diakses oleh *share holder* dan *stake holder* melalui alamat [www.bprwahyunirmala.com](http://www.bprwahyunirmala.com).
- c. BPR menyediakan layanan informasi mengenai karakteristik produk dan jasa pada website.
- d. Dalam rangka menangani pengaduan dan keluhan nasabah, BPR telah membentuk unit kerja khusus, untuk memastikan bahwa seluruh pengaduan dan keluhan telah ditangani sesuai prosedur.

#### 2.2 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31 Desember 2018 tidak ada yang memiliki saham baik pada PT. BPR Wahyu Nirmala maupun pada BPR lainnya.

- 2.3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris Utama adalah istri dari Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Wahyu Nirmala, sehingga Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Jabatan	Hubungan Keluarga dg					
	Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komut	-	√	-	√	√	-
Komisaris	-	√	-	√	-	√
Dirut	-	√	-	√	-	√
Direktur	-	√	-	√	-	√

Jabatan	Hubungan Keuangan dg					
	Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komut	-	√	-	√	√	
Komisaris	-	√	-	√	-	√
Dirut	-	√	-	√	-	√
Direktur	-	√	-	√	-	√

- 2.4 Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Paket/kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp 492 juta dirincikan pada tabel berikut ini

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Jumlah keseluruhan gaji	2	186.000.000	2	216.000.000
Tunjangan	-		2	90.000.000
Tantiem	-			-
Kompensasi berbasis saham	-			-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-			-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan		Komisaris Utama fasilitas berupa kendaraan operasional.		Direksi mendapat fasilitas berupa kendaraan operasional.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam stau tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp 2 Milyar		
Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Milyar		
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Milyar		
Rp 500 juta ke bawah	2	2

## 2.5 *Share Option*

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

## 2.6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 7,34
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1,46
3. Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1,58
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan Dewan Komisaris tertinggi adalah 1 : 1,61
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan pegawai tertinggi adalah 1 : 1,00

## 2.7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali yang dituangkan dalam risalah rapat yaitu :

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
1	07/01/2018	Target Rencana Bisnis 2018	20 orang
2	01/03/2018	Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis BPR, Isu-isu terkini, Evaluasi temuan KAP, Evaluasi kebijakan strategis BPR	2 orang
3	23/03/2018	Proteksi Perusahaan an Karyawan, Kinerja Perusahaan	14 orang



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
4	01/05/2018	Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis BPR, Isu-isu terkini, Evaluasi hasil audit OJK, Evaluasi kebijakan strategis BPR.	2 orang
5	02/07/2018	Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnsi BPR, Isu-isu terkini, Evaluasi hasil audit SPI, Biaya pendidikan, Evaluasi kebijakan strategis BPR.	2 orang
6	04/09/2018	Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnsi BPR, Isu-isu terkini, APU dan PPT, Evaluasi kebijakan strategis BPR.	2 orang
7	06/11/2018	Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnsi BPR, Evaluasi kebijakan strategis BPR.	2 orang

## 2.8 Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Jumlah internal fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum ada upaya penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Jadi, tidak ada penyimpangan internal yang terjadi di PT. BPR Wahyu Nirmala selama tahun 2018.

## 2.9 Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum.

## 2.10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR akan terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

## 2.11 Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2018 PT. BPR Wahyu Nirmala tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial maupun politik

### BAB III

#### Kesimpulan

- 3.1 Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Wahyu Nirmala periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Nilai komposit GCG sebesar 2,43 dengan predikat Baik
  - b. Peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,93	0,38
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2,33	0,34
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0%	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	3	0,3
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10%	2,93	0,29
6	Penerapan fungsi audit intern	10%	2,75	0,28
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,50%	3	0,08
8	Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern	10%	0	0
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,50%	3	0,23
10	Rencana bisnis BPR	7,50%	3	0,23
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank dan laporan internal	7,50%	3	0,23
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>		<b>2,36</b>
<b>Predikat Komposit</b>				<b>Baik</b>

Hasil penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Wahyu Nirmala periode tahun 2018 secara umum berpredikat “Baik” dengan nilai angka komposit 2,36.

#### 3.2 Penutup


Demikian laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Wahyu Nirmala tahun 2018 untuk periode penilaian 31 Desember 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016 yang telah mengungkapkan aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan


good corporate governance sesuai kondisi sebenarnya pada PT. BPR Wahyu Nirmala. Sehingga dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik. Terlampir kami sampaikan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Wahyu Nirmala tahun buku 31 Desember 2018.


Demikian laporan ini kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

Badung, 29 April 2019


PT. BPR WAHYU NIRMALA

  
I Ketut Karwa, SE  
*Direktur Utama*

  
I Gede Sudiarta, SE  
*Direktur*



Menyetujui,

  
Luh Putu Hartami, SE., MM., MBA  
*Komisaris Utama*

  
Ni Luh Putu Ratnasari, SE  
*Komisaris*